

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah: **Akuntansi Sektor Publik**

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.**
- 2. Mega Metalia, SE, M.Si., MSAk., Ak**
- 3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.**



Disusun Oleh :

Kelompok 1

Zulfa Salsabila 2313031038

Lilin Ratnasari 2313031056

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta berbagai upaya, tugas makalah mata kuliah Akuntansi Sektor Publik “Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik ” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada Ibu. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. Selaku dosen pengampu mata kuliah dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami selaku penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-sebaiknya, berdasarkan pengetahuan dan beberapa referensi yang kami ambil, meskipun tidak lengkap.

Di samping itu, apabila dalam makalah ini didapati kekurangan dan kesalahan, baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari.

Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2025

Kelompok 1

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 1 |
| 1.3 Tujuan Pembahasan..... | 2 |
| BAB II : PEMBAHASAN | 3 |
| 2.1 Karakteristik dan lingkungan sektor publik | 3 |
| 2.2 Sifat karakteristik dan faktor yang mempengaruhi sektor publik | 4 |
| 2.3 Perbedaan dan persamaan sifat dan karakteristik sektor publik..... | 7 |
| 2.4 Tujuan akuntansi sektor publik | 8 |
| BAB III : PENUTUP | 11 |
| 3.1 Kesimpulan | 11 |
| 3.2 Saran..... | 11 |
| DAFTAR PUSTAKA | 12 |
| STUDI KASUS..... | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola biaya sosial dan ekonomi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Tuntutan terhadap efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, unit kerja pemerintahan, departemen, maupun lembaga negara lainnya. Kondisi ini menjadikan akuntansi sektor publik semakin cepat diterima dan diakui sebagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan urusan publik secara lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntansi sektor publik berperan penting dalam mendukung penilaian kelayakan praktik manajemen. Hal ini mencakup perbaikan pada berbagai aspek, seperti sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, hingga implikasi finansial dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan adanya sistem akuntansi sektor publik yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pencatatan transaksi, tetapi juga memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pentingnya peranan tersebut menjadikan akuntansi sektor publik sebagai topik yang terus didiskusikan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan lingkungan sektor publik?
2. Seperti apa sifat karakteristik dan faktor sektor publik ?
3. Apa saja perbedaan dan persamaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta ?
4. Apa Tujuan akuntansi sektor publik

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk memahami karakteristik dan lingkungan sektor publik.
2. Untuk mengetahui apa saja sifat karakteristik dan faktor yang mempengaruhi sektor publik.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dan sektor swasta.
4. Untuk mengetahui tujuan akuntansi sektor publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain: badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Siregar (2021), sektor publik adalah organisasi yang aktivitasnya berfokus pada penyediaan layanan publik yang dibiayai melalui pajak atau pungutan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan, bukan mencari laba. Hal ini berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan. Sedangkan Susanti (2020) menjelaskan bahwa sektor publik mencakup organisasi pemerintahan maupun organisasi nirlaba yang sebagian besar pendanaannya bersumber dari masyarakat, baik melalui pajak, iuran, maupun donasi.

Lebih lanjut, Haryanto (2022) menekankan bahwa sektor publik tidak terbatas pada instansi pemerintahan, tetapi juga meliputi organisasi sosial, pendidikan, dan kesehatan yang mengelola dana publik untuk kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Pratama (2023) menyatakan bahwa ruang lingkup sektor publik kini semakin luas, mencakup pemerintahan pusat dan daerah, BUMN/BUMD, organisasi politik, LSM, yayasan, hingga universitas, seiring berkembangnya kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Dengan cakupan yang luas tersebut, dapat dipahami bahwa sektor publik hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dijalankan oleh sektor swasta, misalnya dalam layanan komunikasi, pendidikan, transportasi publik, hingga pengelolaan sampah. Namun demikian, menurut *Haryanto (2022)*, ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak bisa diserahkan kepada sektor swasta, seperti penyusunan regulasi, birokrasi pemerintahan, serta pengelolaan keuangan negara. Hal ini karena fungsi tersebut berkaitan erat dengan legitimasi, kedaulatan, serta tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta, baik dari sisi tujuan, sistem pelaporan, maupun mekanisme pertanggungjawaban.

2.2 Sifat, Karakteristik, dan Faktor yang Mempengaruhi Sektor Publik

A. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik

Sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang membedakannya dari sektor swasta. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan, sifat kegiatan, sumber pendanaan, dan lingkup pertanggungjawaban. Pada dasarnya, organisasi sektor publik bersifat nonprofit, yaitu tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan lebih pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut *Siregar (2021)*, organisasi sektor publik adalah entitas yang aktivitasnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar mengikuti mekanisme pasar. Prinsip utama sektor publik adalah akuntabilitas publik, yakni kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan dana kepada masyarakat sebagai pemilik sah sumber daya publik.

Lebih lanjut, *Susanti (2020)* menyatakan bahwa karakteristik sektor publik dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Tujuan: Memberikan pelayanan publik, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba.
2. Sumber Dana: Dana sektor publik berasal dari masyarakat, melalui pajak, retribusi, hibah, pinjaman pemerintah, dan sumbangan. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Pertanggungjawaban: Laporan keuangan sektor publik ditujukan kepada masyarakat, parlemen, lembaga pengawas, serta auditor eksternal, bukan kepada pemegang saham

seperti di sektor swasta.

4. Sifat Kegiatan: Aktivitas organisasi publik umumnya meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, serta pembangunan infrastruktur.
5. Cakupan: Lingkup kegiatan sektor publik lebih luas dan kompleks karena mencakup seluruh lapisan masyarakat serta bersifat menyeluruh dalam pelayanan.

Menurut Pratama (2023), karakteristik sektor publik juga dipengaruhi oleh tuntutan transparansi, digitalisasi sistem keuangan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Hal ini menandakan bahwa sektor publik tidak hanya dituntut untuk mengelola dana secara efektif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui sistem akuntansi yang modern, akurat, dan terbuka.

Dengan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik hadir bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan kewajiban negara. Oleh sebab itu, sistem akuntansi sektor publik dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam mengelola dana publik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sektor Publik

Berbeda dengan sektor swasta yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pasar, sektor publik dipengaruhi oleh faktor yang lebih kompleks, yaitu faktor ekonomi, politik, kultural (budaya), dan demografi. Faktor-faktor ini membentuk arah kebijakan, pola pengelolaan, hingga kualitas pelayanan sektor publik.

1. Faktor Ekonomi

Menurut Putri & Hidayat (2021), kondisi ekonomi berpengaruh besar terhadap sektor publik karena sebagian besar penerimaan negara bersumber dari kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa aspek ekonomi yang berpengaruh antara lain:

- Pertumbuhan Ekonomi: pertumbuhan yang tinggi meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi untuk pembangunan.
- Inflasi: inflasi tinggi menurunkan daya beli masyarakat sekaligus menambah beban pengeluaran pemerintah.

- Tenaga Kerja: tingkat pengangguran mendorong pemerintah membuat kebijakan penciptaan lapangan kerja.
- Nilai Tukar Mata Uang: fluktuasi kurs berdampak pada utang luar negeri dan impor barang publik.
- Infrastruktur: ketersediaan infrastruktur mendukung distribusi barang dan jasa publik.
- Pendapatan per Kapita: mencerminkan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan.

Contoh nyata dapat dilihat saat pandemi COVID-19 tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07%, sehingga penerimaan negara turun signifikan dan mengganggu kinerja sektor publik (BPS, 2021).

2. Faktor Politik

Menurut Sari (2022), dinamika politik memengaruhi pengelolaan sektor publik, khususnya dalam penyusunan anggaran, prioritas pembangunan, dan implementasi kebijakan. Faktor politik meliputi:

- Hubungan negara–masyarakat
- Legitimasi pemerintah
- Ideologi negara dan tipe rezim
- Peran elit politik dan parlemen

Sebagai contoh, dalam sistem demokrasi di Indonesia, rancangan APBN harus mendapat persetujuan DPR, sehingga terdapat mekanisme check and balance.

3. Faktor Kultural (Budaya)

Menurut Wulandari (2020), keragaman budaya di Indonesia memengaruhi pola pelayanan publik. Faktor kultural meliputi:

- Keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan adat
- Sistem nilai dan norma yang berlaku
- Latar belakang historis
- Tingkat pendidikan masyarakat

Contohnya, program vaksinasi COVID-19 sempat mendapat resistensi di beberapa daerah karena faktor kepercayaan dan budaya, sehingga pemerintah perlu

pendekatan kultural yang berbeda.

4. Faktor Demografi

Menurut Hidayat & Pratama (2023), kondisi demografi sangat menentukan arah kebijakan publik, karena masyarakat adalah penerima utama layanan. Faktor demografi meliputi:

- Pertumbuhan penduduk
- Struktur usia (produktif dan non-produktif)
- Urbanisasi dan mobilitas penduduk
- Tingkat kesehatan masyarakat

Indonesia dengan mayoritas penduduk usia produktif menuntut penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, Jepang yang didominasi penduduk lansia lebih fokus pada jaminan sosial dan layanan kesehatan.

2.3 Perbedaan dan Persamaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik.

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

| Perbedaan | Sektor Publik | Sektor Swasta |
|--------------------|---|---|
| Tujuan organisasi | Nonprofit motive | Profit motive |
| Sumber pendanaan | Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. | Pembiayaan internal: modal sendiri laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham. |
| Pertanggungjawaban | Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR) | Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|--|
| Struktur organisasi | Birokratis, kaku, dan hierarkis. | Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb. |
| Karakteristik anggaran | Terbuka untuk umum | Tertutup untuk publik |
| Sistem akuntansi | Cash accounting | Accrual accounting |

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta:

- Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi
- Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif
- Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.
- Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan.

2.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Jika akuntansi sektor swasta lebih menitikberatkan pada pencatatan laba dan pengukuran keuntungan bagi pemegang saham, maka akuntansi sektor publik menekankan akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan dana publik secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Riyanto (2021), akuntansi sektor publik bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, parlemen, auditor, dan masyarakat dalam menilai kinerja serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan publik harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan value for money.

Sedangkan menurut Haryanto & Adi (2022), akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan (*good governance*) melalui

penyediaan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pengambilan keputusan publik. Secara lebih rinci, tujuan akuntansi sektor publik dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Management Control* (Pengendalian Manajemen)

Management control adalah proses penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola organisasi agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan ekonomis. Menurut Anthony & Govindarajan (2020), pengendalian manajemen dalam sektor publik bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya publik digunakan sesuai kebijakan dan rencana strategis. Dengan adanya sistem akuntansi, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja unit-unit kerja apakah telah mendukung pencapaian tujuan organisasi atau justru menyimpang. Contoh: Dalam pengelolaan APBD pemerintah daerah, akuntansi sektor publik digunakan untuk menilai efektivitas program pembangunan infrastruktur. Jika laporan keuangan menunjukkan penyimpangan anggaran atau realisasi yang jauh dari target, maka pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah korektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan dana publik. Menurut Mardiasmo (2020), akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik meliputi pertanggungjawaban keuangan, administratif, politik, dan hukum. Akuntansi sektor publik memungkinkan publik untuk menilai apakah pemerintah telah mengelola dana sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh Mahmudi (2021), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat, legislatif, dan lembaga pemeriksa (BPK). Contoh: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahun diaudit BPK menjadi tolok ukur transparansi keuangan negara.

3. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana public. Menurut Kusnandar & Yudianto (2023), transparansi diwujudkan

dengan menyajikan laporan keuangan yang jelas, dapat diakses, dan dipahami oleh masyarakat luas. Contoh: Publikasi *APBN Kita* oleh Kementerian Keuangan setiap bulan merupakan wujud transparansi keuangan negara. Melalui laporan ini, masyarakat dapat mengetahui realisasi pendapatan dan belanja negara secara lebih terbuka.

4. *Performance Evaluation* (Evaluasi Kinerja)

Menurut Pratama (2022), akuntansi sektor publik juga berfungsi untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Informasi keuangan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program. Contoh: Dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP), akuntansi sektor publik dapat membantu menilai apakah dana pendidikan sudah disalurkan tepat sasaran kepada pelajar dari keluarga tidak mampu.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Akuntansi sektor publik merupakan bagian penting dalam pengelolaan organisasi publik yang memiliki cakupan lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Pengertian sektor publik menurut para ahli menekankan bahwa organisasi ini bersifat nonprofit, dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada institusi pemerintahan, tetapi juga mencakup BUMN, BUMD, organisasi politik, universitas, yayasan, LSM, hingga lembaga nirlaba lain yang mengelola dana publik.

Sifat dan karakteristik sektor publik terutama ditandai oleh tujuan yang berorientasi pada pelayanan publik, sumber dana yang berasal dari masyarakat melalui pajak, retribusi, maupun hibah, serta kewajiban pertanggungjawaban yang lebih luas karena menyangkut kepentingan publik. Berbeda dengan sektor swasta, sektor publik dipengaruhi oleh faktor yang lebih beragam, yaitu faktor ekonomi, politik, kultural, dan demografi. Faktor-faktor ini memengaruhi arah kebijakan, pola pengelolaan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik berperan sangat penting dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Melalui sistem akuntansi yang baik, organisasi sektor publik dapat memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial

3.2 Saran

Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber referensi maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pada penelitian atau penulisan selanjutnya dapat menggunakan sumber-sumber yang lebih beragam, terbaru, dan relevan, sehingga pembahasan mengenai akuntansi sektor publik menjadi lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan juga kajian yang lebih mendalam terkait praktik akuntansi sektor publik di lapangan agar teori dan implementasi dapat dihubungkan secara lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2020). *Management control systems*. New York: McGraw-Hill.
- Haryanto, D., & Adi, P. (2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 45–60.
- Kusnandar, A., & Yudianto, I. (2023). *Good governance dan akuntansi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pratama, R. (2022). Peran akuntansi sektor publik dalam evaluasi kinerja pemerintah. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(3), 211–225.
- Riyanto, A. (2021). Tujuan akuntansi sektor publik dalam tata kelola keuangan negara. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 101–115.

STUDI KASUS

Kasus Korupsi Proyek KTP Elektronik (e-KTP)

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dicanangkan pemerintah pada tahun 2011 dengan tujuan menciptakan data kependudukan tunggal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki sistem administrasi negara. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 5,9 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek e-KTP penuh dengan permasalahan: distribusi kartu yang terlambat, kualitas chip yang rendah, serta penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya praktik korupsi besar-besaran dengan melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, hingga pihak swasta. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 2,3 triliun. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proyek yang semestinya meningkatkan legitimasi birokrasi justru memperlihatkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi sektor publik.

Pertanyaan:

Bagaimana akuntansi sektor publik dapat berperan secara strategis untuk mencegah terjadinya kasus korupsi seperti proyek e-KTP, dengan mempertimbangkan fungsi *management control* dan *accountability*?